



## Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Fitri Andriani Setyowati✉, Inaya Sari Melati

DOI: 10.15294/eeaj.v9i3.42413

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

### Sejarah Artikel

Diterima: 14 Juli 2020  
Disetujui: 1 Agustus 2020  
Dipublikasikan: 30 Oktober 2020

### Keywords

*Basic Education Level; Poverty Level, Unemployment Level*

### Abstrak

Permasalahan kemiskinan masih menjadi perhatian yang serius mengingat tingginya tingkat kemiskinan di beberapa provinsi di Indonesia yaitu diatas 10% pada tahun 2017. Kemiskinan di Pulau Jawa masih tergolong tinggi, yang pertama terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diikuti Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur sedangkan Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Banten tergolong rendah di bawah 10%. Kabupaten Wonosobo sebagai predikat kabupaten termiskin di Jawa Tengah dengan persentase penduduk miskin sebesar 20,32%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dasar dan tingkat pengangguran terbuka berdasarkan klasifikasi perkotaan dan perdesaan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik secara nasional maupun di Kabupaten Wonosobo, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, serta Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Transmigrasi Kabupaten Wonosobo. Metode analisis menggunakan deskriptif kuantitatif dan analisis inferensial regresi linear berganda. Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis pengaruh faktor tersebut menggunakan data *cross section* dengan EViews 9. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa pendidikan, pendidikan di perdesaan, serta pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Sedangkan pendidikan di perkotaan, pengangguran di perkotaan dan pengangguran di perdesaan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.

### Abstract

*The issues of poverty is still a serious concern given the high level of poverty in several provinces in Indonesia, which is above 10% in 2017. Poverty in Java is still high, the first in the Special Province of Yogyakarta, Central Java and East Java Provinces mean the Province of West Java, DKI Jakarta Province, and Banten Province are classified as low below 10%. Wonosobo Regency as the poorest district in Central Java with a percentage of poor population of 20.32%. This study aims to determine the effect of basic education level and unemployment level based on the classification of urban and rural areas on the level of poverty in Wonosobo Regency. The data used in this study were secondary data obtained from the BPS both nationally and Wonosobo District, Wonosobo Regency Education Office, and the Department of Manpower Wonosobo Regency. The analytical methods were descriptive quantitative and regression of double linear. The analysis tool used to analyze the influence of these factors using cross section data with EViews 9. Based on the results of data analysis shows that education, rural education, and unemployment affect the poverty rate in Wonosobo Regency. Mean urban education, unemployment in urban areas and unemployment in rural areas do not affect the level of poverty in Wonosobo Regency.*

### How to Cite

Setyowati, Fitri Andriani, & Melati, Inaya Sari. (2020). Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan. *Economic Education Analysis Journal*, 9(3), 875-891.

© 2020 Universitas Negeri Semarang

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang tidak pernah luput dari perhatian pemerintah suatu negara di belahan dunia manapun. Kemiskinan bahkan menjadi persoalan fenomenal dalam bidang ekonomi yang menjadi titik acuan keberhasilan pemerintah negara dari waktu ke waktu, terlebih pada negara yang sedang berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara yang masuk kategori berkembang menyadari pentingnya memperhatikan masalah kemiskinan dan mengusahakan segala upaya untuk menekankan dalam agenda tahunan pemerintah. Hal tersebut dilakukan melalui pemberian kebijakan pemerintahan Indonesia dengan memperhatikan pembangunan nasional, indikator yang digunakan yaitu mengurangi angka pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Persoalan kemiskinan merupakan persoalan rumit yang tidak memiliki ujung pangkal. Hal itu dikarenakan, banyak faktor yang dapat menyebabkan munculnya masalah kemiskinan, begitu juga kemiskinan dapat memunculkan masalah ekonomi pembangunan lainnya. Oleh karenanya, persoalan kemiskinan sering disebut dengan istilah lingkaran setan yang tidak berujung pangkal.

Kemiskinan digambarkan memiliki banyak dimensi dan definisi. Umumnya dimensi yang sering digunakan sebagai dimensi penilaian adalah dari dimensi ekonomi. Standar yang digunakan dalam penilaian kriteria kemiskinan umumnya oleh BPS maupun *World Bank* sama-sama menyoroti dari keadaan penduduk yang kehidupannya berada di bawah rata-rata. Kehidupan dibawah rata-rata dapat ditunjukkan dalam bentuk rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, akses terhadap sanitasi air bersih, keamanan, dan sebagainya (*World Bank*, 2006: 11). Menurut para ahli ekonomi, kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensial (Arsyad, 2010: 299). Kemiskinan yang bersifat multidimensial dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa miskin aset, organisasi sosial politik, dan pen-

getahuan serta keterampilan yang rendah. Sedangkan aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber keuangan, dan informasi. Dilain sisi, kemiskinan juga dikatakan sebagai persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, serta ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Wijayanti, 2005: 215).

Kuncoro (2006: 112) menyatakan kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BAPPENAS) mendefinisikan kemiskinan berdasarkan pendekatan keluarga, yaitu membagi kriteria keluarga dalam lima tahapan: keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS-I), keluarga sejahtera II (KS-II), keluarga sejahtera III (KS-III), dan keluarga sejahtera III plus (KS-III plus). Keluarga sejahtera I adalah kelompok orang yang termasuk dalam klasifikasi mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*). Klasifikasi keluarga sejahtera II yaitu kemampuan kelompok orang dalam memenuhi kebutuhan psikologi (*psychological needs*), dan klasifikasi keluarga sejahtera III adalah kemampuan kelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pengembangan (*developmental needs*). Persoalan kemiskinan dan pembahasan mengenai penyebab kemiskinan hingga saat ini masih menjadi perdebatan baik di lingkungan akademik maupun pada tingkat penyusun kebijakan pembangunan (Suryawati, 2005). Salah satu perdebatan tersebut adalah menetapkan definisi terhadap seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang

yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang dimaksud miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar (Rumahorbo, 2014 :10).

Persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa pada tahun 2017 sebesar 55,73%. Total penduduk miskin di Pulau Jawa tersebut terbagi-bagi menjadi 6 provinsi, dimana Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki persentase penduduk miskin tertinggi yaitu sebesar 13,02%, diikuti oleh Jawa Tengah 13,01%, Jawa Timur 11,77%, Jawa Barat 8,71, DKI Jakarta 3,77%, dan Banten 5,45%. Jawa Tengah merupakan provinsi dengan persentase tingkat kemiskinan absolut paling tinggi kedua setelah DIY dengan selisih 0,1% yang berada pada level 13,01% dimana hal tersebut masih tergolong Hard Core Poverty (>10%) dalam artian tingkat kemiskinan masih berada pada level yang tinggi (Gambar 1.).



**Gambar 1.** Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa, 2017

Sumber : Diolah dari Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2017

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik, hampir sekitar 50% kabupaten/kota di Jawa Tengah masih memiliki tingkat kemiskinan absolute > 10% bahkan terdapat 15 kabupaten di Jawa Tengah yang termasuk zona merah kemiskinan. 15 kabupaten yang termasuk dalam zona merah kemiskinan, terdiri atas: Kabupaten Wonosobo, Kebumen, Brebes, Purbalingga, Rembang, Pemalang, Banjarnegara, Banyumas, Klaten, Sragen, Cilacap, Demak, Purworejo, Grobogan, dan Demak. Jawa Tengah terdiri atas 35 kabupaten/kota dengan Kabupaten Wonosobo sebagai predikat kabupaten termiskin di Jawa Tengah dengan persentase penduduk miskin sebesar 20,32%, persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo yaitu sebesar 20,03% yang merupakan kabupaten termiskin di DIY serta kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang dengan persentase penduduk miskin sebesar



**Gambar 2.** Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah, 2017

Sumber : Diolah dari Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota, 2017

Kemiskinan selalu dikaitkan dengan ketidakmampuan dalam mencapai pendidikan tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Rejekiingsih (2013: 12) menunjukkan hasil regresi variabel pendidikan menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2012 : 167) menunjukkan hasil regresi variabel pendidikan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di

KTI. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Elfassy (2015: 1242-1243) menunjukkan bahwa usia rata-rata pada awal tahun 1990 adalah 30 tahun, 54,9% adalah perempuan, dan 50,6% berkulit hitam. Kemiskinan yang di alami oleh penduduk Amerika antara tahun 1990 dan 2015 lebih cenderung dialami oleh perempuan yang berkulit hitam karena memiliki rata-rata pendidikan yang lebih rendah yang disebabkan oleh pendidikan orang tua mereka juga rendah. Jika dikaitkan dengan teori lingkaran setan kemiskinan versi Nurkse (1953) menggambarkan bahwa keterbelakangan dan ketertinggalan merupakan suatu hal yang harus diputus mata rantainya guna mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi. Keterbelakangan dan ketertinggalan dapat diatasi dengan adanya pendidikan yang diselenggarakan oleh negara untuk warga negaranya guna mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat mengurangi tingkat keterbelakangan dan ketertinggalan suatu daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mayo (2000: 521) terkait *the role of employee development in the growth of intellectual capital* yang menjelaskan bahwa modal manusia merupakan pendorong utama dalam pertumbuhan sebuah perusahaan. Sebagian besar perusahaan telah mengetahui secara intuitif bahwa masa depan perusahaan terletak pada kekuatan sumber daya intelektual karyawan, sehingga perusahaan akan berupaya mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. *Human Capital* merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan kemampuan seseorang untuk menjalankan tugasnya sehingga dapat menciptakan suatu nilai untuk mencapai tujuan. Pembentukan nilai tambah yang dikontribusikan oleh *human capital* dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya akan memberikan *sustainable revenue* di masa akan datang bagi suatu organisasi (Malhotra 2003 dan Bontis dalam Rackhmawati, dkk 2008: 13). Sedangkan menurut Mayo (2000: 526) menjelaskan bahwa *Human capital* merupakan nilai tambah bagi perusahaan dalam perusahaan setiap hari, melalui motivasi, ko-

mitmen, kompensasi, serta efektivitas kerja tim, nilai tambah yang dapat dikontribusikan oleh pekerja berupa: pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan, pemindahan pengetahuan dari pekerja serta perubahan budaya manajemen Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *human capital* merupakan segala sesuatu mengenai manusia dengan segala kapasitas yang dimilikinya untuk terus dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan menciptakan nilai tambah dalam diri individu.

Menurut Andrew Mayo (2000: 526-530), *human capital* memiliki lima komponen yang memiliki peranan yang berbeda dalam menciptakan *human capital* perusahaan yang pada akhirnya menentukan nilai sebuah perusahaan. Kelima nilai *human capital* tersebut adalah *individual capability*, *individual motivation*, *the organization climate*, *workgroup effectiveness* dan *leadership*. *Individual capability* memiliki lima kriteria, yaitu: 1) *personal capabilities*, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dari dalam dirinya sendiri, meliputi penampilan, pikiran, tindakan, dan perasaan, 2) *profesional and technical know-how* yaitu kemampuan untuk bersikap profesional dalam setiap situasi dan kondisi serta adanya kemauan untuk melakukan *transfer knowledge* dari yang senior ke junior, 3) *experience*, yaitu seseorang yang berkompoten dan memiliki pengalaman yang cukup lama di bidangnya serta memiliki sikap terbuka terhadap pengalaman, 4) *the network and range of personal contacts*, yaitu seseorang dikatakan berkompoten apabila memiliki jaringan atau koneksi yang luas dengan siapa saja terutama pada orang-orang yang berhubungan dengan profesinya, 5) *the value and attitudes that influence actions*, yaitu nilai dan sikap akan mempengaruhi tindakannya di dalam lingkungan kerja seperti memiliki kestabilan emosi, ramah, dapat bersosialisasi, dan tegas.

Pendidikan merupakan *human capital investment* karena pada dasarnya biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan dapat digolongkan sebagai investasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan

dan keahlian juga akan meningkat sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja seseorang. Penggunaan persentase rasio penduduk usia 10 tahun ke atas yang telah tamat pendidikan SD dan SMP dirasa cukup mewakili pendidikan itu sendiri. Pada tingkat pendidikan SD dan SMP seseorang telah memiliki pengetahuan dan keahlian dasar untuk menghindari mereka dari keterbelakangan dan kebodohan (Wahyudi dan Rejekiingsih, 2013; 8).

Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dalam arti luas berarti suatu proses untuk mengembangkan semua aspek kepribadian manusia, yang mencakup: pengetahuannya, nilai serta sikapnya, dan keterampilannya. Pendidikan pada hakikatnya akan mencakup kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih. Kegiatan tersebut, dilaksanakan sebagai suatu usaha untuk mentransformasikan nilai-nilai. Maka dalam penjelasannya ketiga kegiatan tersebut harus berjalan secara serempak dan terpadu, berkelanjutan, serta serasi dengan perkembangan anak didik serta lingkungan hidupnya. Pendidikan mengemban tugas untuk menghasilkan generasi yang baik, manusia-manusia yang lebih berkebudayaan, manusia sebagai individu yang memiliki kepribadian yang lebih baik. Nilai-nilai yang hidup dan berkembang di suatu masyarakat atau negara, menggambarkan pendidikan dalam suatu konteks yang sangat luas, menyangkut kehidupan seluruh umat manusia, yang digambarkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik (Munib, 2010: 32).

Tujuan pendidikan dasar yaitu Meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Untuk mencapai tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dituntut peran guru dalam proses pembelajaran agar siswa memiliki keseimbangan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Peran guru dalam menyediakan dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna sangat dibutuhkan

peserta didik sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian dasar untuk menghindari kebodohan dan keterbelakangan. Upaya mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional, maka kegiatan pendidikan dilaksanakan melalui tiga jalur sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, pendidikan non formal, dan informal yang saling melengkapi.



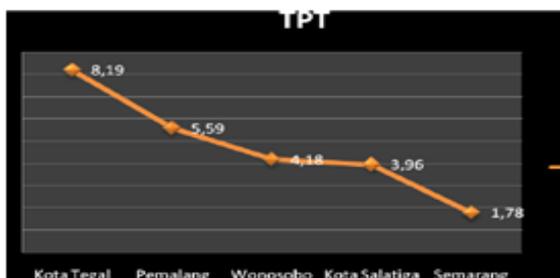
**Gambar 3.** Persentase Tamat Pendidikan Dasar Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Sumber : Diolah dari Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota, 2017

Akar permasalahan lainnya yang terkait dengan jumlah penduduk miskin yaitu pengangguran. Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya (Sukirno, 2013: 355). Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama (Todaro, 2006: 441). Pengangguran berarti permintaan global yang lebih rendah dan investasi modal manusia yang lebih rendah. sebagai konsekuensi dari erosi modal manusia, pengangguran jangka panjang kehilangan kualifikasi mereka sebagian atau seluruhnya, sementara keterampilan mereka menjadi usang pada masa kemajuan teknologi yang cepat (Nagel, 2015: 65).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2012: 167) menunjukkan hasil regresi variabel pengangguran menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di KTI. Sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh Wahyudi dan Rejekiingsih (2013: 13) menunjukkan hasil regresi variabel pengangguran menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Ketiga, hasil penelitian Irhamni (2017: 76-77) menjelaskan bahwa variabel jumlah penduduk, dan pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Jika dikaitkan dengan teori lingkaran setan versi Nurkse (1953) produktivitas sebagai salah satu sebab kemiskinan. Pengangguran diartikan sebagai tingkat produktivitas seseorang yang rendah. Hal ini karena penganggur tidak memiliki suatu pekerjaan untuk menghasilkan upah ataupun gaji. Padahal sebagian besar rumah tangga bergantung dari gaji/ upah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pengangguran lebih sering terjadi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah sehingga mereka harus hidup dibawah garis kemiskinan. Pengangguran dalam penelitian ini menggunakan indikator tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Wonosobo termasuk dalam kategori sedang (Gambar 4.).



**Gambar 4.** Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2018

Kemiskinan di negara berkembang seperti di Indonesia juga dipengaruhi faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena

sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau perdesaan akan sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan. Kabupaten Wonosobo merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian berkisar antara 275 meter sampai 2.250 meter di atas permukaan laut, sehingga menyebabkan jarak antar kecamatan menuju ibukota kabupaten cukup jauh. Wilayah kecamatan perkotaan di Kabupaten Wonosobo terdiri atas 10 kecamatan dan wilayah kecamatan perdesaan terdiri atas 5 kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Penentuan perkotaan dan perdesaan tersebut berdasarkan teori aglomerasi yang dikemukakan oleh Kuncoro (2002) yang berisi bahwa konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan yang di asosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen (Zuliastri, 2013: 116).

Kabupaten Wonosobo mendapatkan predikat sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Apabila dilihat dari faktor tingkat pendidikan dasar dan tingkat pengangguran terbuka, tingkat pendidikan dasar di Kabupaten Wonosobo berada pada kategori tinggi (Gambar 3.) dan tingkat pengangguran terbuka berada pada kategori sedang (Gambar 4.) tetapi hal tersebut tidak mengubah predikat Kabupaten Wonosobo sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan pengaruh tingkat pendidikan dasar terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Wonosobo; (2) mendeskripsikan pengaruh tingkat pendidikan dasar di perkotaan terhadap tingkat pengangguran terbuka di perkotaan di Kabupaten Wonosobo; (3) mendes-

kripsikan pengaruh tingkat pendidikan dasar di perdesaan terhadap tingkat pengangguran terbuka di perdesaan di Kabupaten Wonosobo; (4) mendeskripsikan pengaruh tingkat pendidikan dasar terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo; (5) mendeskripsikan pengaruh tingkat pendidikan dasar di perkotaan terhadap tingkat kemiskinan di perkotaan di Kabupaten Wonosobo; (6) mendeskripsikan pengaruh tingkat pendidikan dasar di perdesaan terhadap tingkat kemiskinan di perdesaan di Kabupaten Wonosobo; (7) mendeskripsikan pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo; (8) mendeskripsikan pengaruh tingkat pengangguran terbuka di perkotaan terhadap tingkat kemiskinan di perkotaan di Kabupaten Wonosobo; (9) mendeskripsikan pengaruh tingkat pengangguran terbuka di perdesaan terhadap tingkat kemiskinan di perdesaan di Kabupaten Wonosobo; (10) mendeskripsikan pengaruh tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan dasar di perkotaan, tingkat pendidikan dasar di perdesaan, tingkat pengangguran terbuka, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan, tingkat pengangguran terbuka di perdesaan secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2004: 14), penelitian kuantitatif adalah metode penelitian berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistika. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo dengan sampel adalah seluruh anggota populasi menjadi sampel penelitian, hal ini karena data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan *non probability sampling* dengan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2015: 124).

Variabel penelitian adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2006: 10). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu tingkat pendidikan menggunakan perhitungan angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun, tingkat pengangguran menggunakan perhitungan tingkat pengangguran terbuka. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu tingkat kemiskinan. Penelitian ini ditambahkan kontribusi variabel dummy. Variabel dummy yang digunakan yaitu dummy sebagai slope (variabel yang selalu menempel pada variabel independen). Variabel dummy yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel wilayah perkotaan dan perdesaan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengambilan data sekunder yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006: 231). Selanjutnya hasil dari studi dokumentasi yang diterima kemudian diolah selanjutnya dilakukan pengecekan dengan kondisi sebenarnya dilapangan melalui wawancara kepada staff Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Bapak Firman selaku Kepala UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja, dan Ibu Verlia selaku staff pelayanan statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif dan analisis inferensial regresi berganda dengan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan linearitas. Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, serta uji hipotesis yang terdiri atas : uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan uji koefisiensi determinasi  $R^2$ .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Wonosobo secara geografis

terletak di antara 7° 11' sampai 7° 36' Lintang Selatan dan 109° 43' sampai 110° 04' Bujur Timur. Kabupaten Wonosobo termasuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Wonosobo berjarak 120 km dari ibukota Provinsi Jawa Tengah dan 520 km dari ibu kota negara (Jakarta). Kabupaten Wonosobo merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian berkisar antara 275 meter sampai dengan 2.250 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Wonosobo adalah 98.468 ha. Secara administratif Kabupaten Wonosobo dibagi menjadi 15 kecamatan, antara lain : Kecamatan Wadaslintang, Kepil, Sapuran, Kalibawang, Kaliwiro, Leksono, Sukoharjo, Selomerto, Kalikajar, Kertek, Wonosobo, Watumalang, Mojotengah, Garung, Kejajar.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemiskinan per kecamatan di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017, untuk mencapai tujuan tersebut peneli-

tian ini menggunakan regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil (OLS) dengan menggunakan EViews Versi 9. Diperoleh hasil regresi yang disajikan dalam tabel 1

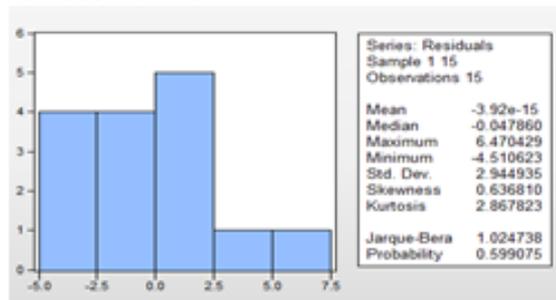
Hasil regresi berganda pada Tabel 1. diketahui bahwa faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo adalah tingkat pendidikan yang memiliki nilai probabilitas 0,0084, tingkat pendidikan di perdesaan memiliki probabilitas 0,0000, dan tingkat pengangguran memiliki probabilitas 0,0409, sedangkan tingkat pendidikan di perkotaan, tingkat pengangguran di perkotaan, maupun tingkat pengangguran di perdesaan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo karena nilai probabilitas masing-masing 0,0683, 0,1777, dan 0.14373. Selanjutnya dilakukan uji prasyarat analisis yang terdiri atas: uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas digunakan dengan menggunakan *histogram normality test* melalui nilai probability JB. Nilai *Probability JB* menunjukkan nilai

**Tabel 1.** Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Koefisien	t-statistik	Prob
Konstanta	0,207302	0,688346	0,5043
Tingkat pendidikan dasar terhadap tingkat pengangguran terbuka	0.136589	2.129017	0.0529
Tingkat pendidikan dasar di perkotaan terhadap tingkat pengangguran terbuka di perkotaan	0.334861	6.994742	0.0000
Tingkat pendidikan dasar di perdesaan terhadap tingkat pengangguran terbuka di perdesaan	0.247537	9.054791	0.0000
Tingkat pendidikan dasar terhadap tingkat kemiskinan	-5.230548	-3.269634	0.0084
Tingkat pendidikan dasar di perkotaan terhadap tingkat kemiskinan	2.405204	2.042829	0.0683
Tingkat pendidikan dasar di perdesaan terhadap tingkat kemiskinan	7.635752	6.896260	0.0000
Tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan	11.95914	2.345902	0.0409
Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan terhadap tingkat kemiskinan	4.634052	1.450068	0.1777
Tingkat pengangguran terbuka di perdesaan terhadap tingkat kemiskinan	-7.325092	-1.570834	0.1473

Sumber : Data diolah, 2019

0,599075. Artinya nilai *probability* JB > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.



**Gambar 5.** Uji Normalitas  
Sumber : Data diolah, 2019

**Tabel 2.** Uji Linearitas

Ramsey RESET Test		
	Value	Probability
t-statistik	0,565487	0,5858
F-statistik	0,319776	0,5856
Likelihood ratio	0,523710	0,4693

Sumber : Data diolah, 2019

Uji linearitas bertujuan untuk menge-

**Tabel 3.** Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF	Kesimpulan
Tingkat pendidikan dasar terhadap tingkat pengangguran terbuka	1,000000	Tidak ada multikolinieritas
Tingkat pendidikan dasar di perkotaan terhadap tingkat pengangguran terbuka di perkotaan	1,000000	Tidak ada multikolinieritas
Tingkat pendidikan dasar di perdesaan terhadap tingkat pengangguran terbuka di perdesaan	1,000000	Tidak ada multikolinieritas
Tingkat pendidikan dasar terhadap tingkat kemiskinan	9,720484	Tidak ada multikolinieritas
Tingkat pendidikan dasar di perkotaan terhadap tingkat kemiskinan	3,499463	Tidak ada multikolinieritas
Tingkat pendidikan dasar di perdesaan terhadap tingkat kemiskinan	3,094840	Tidak ada multikolinieritas
Tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan	14,00989	Ada multikolinieritas
Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan terhadap tingkat kemiskinan	1,860500	Tidak ada multikolinieritas
Tingkat pengangguran terbuka di perdesaan terhadap tingkat kemiskinan	3,961414	Tidak ada multikolinieritas

Sumber: Data diolah, 2019

tahui apakah dua variabel atau lebih mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji linearitas dilakukan pada masing-masing variabel bebas dan terikat dengan hasil Prob. F hitung dapat dilihat pada baris-F statistik kolom *probability*. Pada penelitian ini nilainya 0,5856 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas linear dengan variabel terikat.

Setelah dilakukan uji prasyarat analisis dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri atas: uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Multikolinieritas adalah terjadinya hubungan linear antara variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda (Gujarati, 2012: 380). Multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi yang tinggi atau yang sempurna antar variabel independen yang terdapat pada model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Multikolinieritas dapat dilihat dari *Variance Inflation Factors* (VIF). VIF mencoba melihat bagaimana varian dari suatu penaksir (estimator) meningkat seandainya ada multikolinier-

tas dalam suatu model empiris. Jika VIF dari suatu variabel melebihi 10, maka suatu variabel dikatakan berkolerasi sangat tinggi (Gujarati, 2012: 380).

Setelah dilakukan uji multikolinearitas dengan mengamati nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) diperoleh hasil model regresi bebas dari multikolinieritas karena nilai VIF ada delapan variabel  $< 10$ . Nilai VIF tingkat pendidikan dasar terhadap tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,000000, tingkat pendidikan dasar di perkotaan terhadap tingkat pengangguran terbuka di perkotaan sebesar 1,000000, tingkat pendidikan dasar di perdesaan terhadap tingkat pengangguran terbuka di perdesaan sebesar 1,000000, tingkat pendidikan dasar terhadap tingkat kemiskinan sebesar 9,720484, tingkat pendidikan dasar di perkotaan terhadap tingkat kemiskinan sebesar 3,499463, tingkat pendidikan dasar di perdesaan terhadap tingkat kemiskinan sebesar 3,094840, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan terhadap tingkat kemiskinan sebesar 1,860500, dan tingkat pengangguran terbuka di perdesaan terhadap tingkat kemiskinan sebesar 3,961414. Sedangkan terdapat satu variabel  $> 10$  yaitu tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan yaitu sebesar 14,00989, sehingga dalam penelitian ini terjadi gangguan multikolinieritas dalam regresinya.

Heteroskedasticity Test Glejser			
F-statistic	3.333167	Prob. F(4,10)	0.0558
Obs*R-squared	8.571246	Prob. Chi-Square(4)	0.0728
Scaled explained SS	5.743761	Prob. Chi-Square(4)	0.2191

**Gambar 6.** Uji Heteroskedastisitas  
Sumber : Data diolah, 2019.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas itu dengan melihat *Heteroskedasticity Test Glejser*. Apabila nilai Prob F lebih

besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas menggunakan nilai glejser menunjukkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Hal tersebut dapat diketahui dari nilai Prob F sebesar  $0,0558 > 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi digunakan untuk menunjukkan korelasi antar variabel. Dalam penelitian ini untuk mengetahui ada dan tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari hasil *Durbin-Watson Stat*.

Teknik mendeteksi Autokorelasi

$$2 < DW < 4 - d_u$$

$$2 < 2,1038 < 4 - 1,543$$

$$2 < 2,1038 < 2,457$$

Data dikatakan lolos jika nilai DW diantara 2 dan 2,457. Berdasarkan hasil perhitungan di atas nilai DW sebesar 2,1038 yang artinya lebih dari 2 dan kurang dari 2,457, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi.

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 2009: 120). Hasil uji hipotesis berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada Tabel 1. Hasil pengujian statistik pada variabel tingkat pendidikan dasar terhadap tingkat pengangguran terbuka diperoleh probabilitas  $0,0529 < 0,05$ , maka  $H_1$  diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh tingkat pendidikan dasar terhadap tingkat pengangguran terbuka. Variabel tingkat pendidikan dasar di perkotaan dengan probabilitas  $0,0000 < 0,05$ , maka  $H_2$  diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh tingkat pendidikan dasar di perkotaan terhadap tingkat pengangguran terbuka di perkotaan. Variabel tingkat pendidikan dasar di perdesaan dengan probabilitas  $0,0000 < 0,05$ , maka  $H_3$  diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh tingkat pendidikan dasar di perdesaan terhadap tingkat pengangguran terbuka di perdesaan.

Variabel tingkat pendidikan dasar terhadap tingkat kemiskinan, diperoleh probabili-

tas sebesar  $0,0084 < 0,05$ , maka  $H_4$  diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh tingkat pendidikan dasar terhadap tingkat kemiskinan. Variabel tingkat pendidikan dasar di perkotaan dengan probabilitas  $0,0683 > 0,05$ , maka  $H_5$  ditolak. Hal ini berarti tidak ada pengaruh tingkat pendidikan dasar di perkotaan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel tingkat pendidikan dasar di perdesaan diperoleh probabilitas sebesar  $0,0000 < 0,05$ , maka  $H_6$  diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh tingkat pendidikan dasar di perdesaan terhadap tingkat kemiskinan.

Variabel tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan, diperoleh probabilitas sebesar  $0,0409 < 0,05$ , maka  $H_7$  diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan. Variabel pengangguran terbuka di perkotaan dengan probabilitas  $0,1777 > 0,05$ , maka  $H_8$  ditolak. Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh tingkat pengangguran terbuka di perkotaan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel tingkat pengangguran terbuka di perdesaan diperoleh probabilitas sebesar  $0,1473 > 0,05$ , maka  $H_9$  ditolak. Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh tingkat pengangguran terbuka di perdesaan terhadap tingkat kemiskinan.

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2009: 120). Hasil uji hipotesis berdasarkan hasil uji simultan (uji F) pada Gambar 7.

R-squared	0.908557	Mean dependent var	22.07867
Adjusted R-squared	0.871979	S.D. dependent var	9.738664
S.E. of regression	3.484494	Akaike info criterion	5.595724
Sum squared resid	121.4170	Schwarz criterion	5.831741
Log likelihood	-36.96793	Hannan-Quinn criter.	5.593210
F-statistic	24.83930	Durbin-Watson stat	2.103763
Prob(F-statistic)	0.000035		

**Gambar 7.** Hasil Analisis Data

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan uji simultan pada Gambar

7. menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-statistik  $0,000035$  dengan signifikan  $5\%$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_{10}$  diterima. Jadi dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan dasar ( $X_1$ ), tingkat pendidikan dasar di perkotaan ( $X_1D_1$ ), tingkat pendidikan dasar di perdesaan ( $X_1D_0$ ), tingkat pengangguran terbuka ( $X_2$ ), tingkat pengangguran terbuka di perkotaan ( $X_2D_1$ ), tingkat pengangguran terbuka di perdesaan ( $X_2D_0$ ) secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo ( $Y$ ).

Uji hipotesis yang ketiga yaitu uji koefisiensi determinasi  $R^2$ . Berdasarkan uji R-squared pada Gambar 7. diketahui besar nilai R-squared adalah  $0,908557$ . Hal ini berarti  $90,86\%$  variasi kemiskinan dijelaskan oleh variabel independen tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan dasar di perkotaan, tingkat pendidikan dasar di perdesaan, tingkat pengangguran terbuka, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan, tingkat pengangguran terbuka di perdesaan. Sedangkan sisanya  $9,14\%$  dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian.

Berdasarkan hasil statistik dan ekonometrik yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang dilakukan mampu menerangkan perubahan-perubahan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Dari seluruh variabel yang dimasukkan kedalam model, ternyata ada tiga variabel bebas yang tidak signifikan yaitu variabel tingkat pendidikan dasar di perkotaan, variabel tingkat pengangguran terbuka di perkotaan dan variabel tingkat pengangguran terbuka di perdesaan. Hal ini berarti bahwa kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan dasar di perdesaan, dan tingkat pengangguran terbuka.

### **Pengaruh Tingkat Pendidikan Dasar Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka**

Pendidikan sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Namun, kondisi perekonomian yang tidak stabil karena masih banyak terdapat penduduk miskin dapat menghambat

berkembangnya pendidikan di suatu daerah. Kondisi pendidikan di Kabupaten Wonosobo masih mengalami kendala di dalam sistem pendidikan, buktinya masih rendah angka partisipasi sekolah yang ada di Kabupaten Wonosobo di tingkat pendidikan dasar. Pengaruh dalam jangka panjang akan mempengaruhi kurangnya keterampilan dan keahlian yang khusus untuk memasuki lapangan pekerjaan sehingga lulusan yang dihasilkan belum memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh dunia kerja, hal ini menyebabkan pendidikan tidak dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dasar akan bergerak mengikuti tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan hal tersebut ketika tingkat pendidikan dasar meningkat, maka secara otomatis tingkat pengangguran terbuka juga meningkat. Hal tersebut disebabkan karena lulusan tingkat pendidikan dasar belum mampu memenuhi kebutuhan perusahaan dalam mempekerjakan tenaga kerja. Berdasarkan Tabel 1. nilai probabilitas sebesar 0,0529 pada tingkat pendidikan dasar, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Wonosobo dikarenakan nilai probabilitasnya kurang dari  $\alpha$  5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Wonosobo dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan dasar.

#### **Pengaruh Tingkat Pendidikan Dasar di Perkotaan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Perkotaan**

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperhatikan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki individu. Semakin tinggi

tingkat pendidikan, maka pengetahuan dan keterampilan juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Berdasarkan hasil uji t pada hubungan tingkat pendidikan dasar di perkotaan yang dapat dijelaskan dengan nilai koefisiensi sebesar 0,334861 sehingga menunjukkan pengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di perkotaan.

Berdasarkan Tabel 1. nilai probabilitas sebesar 0,0000 pada tingkat pendidikan dasar di perkotaan, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dasar di perkotaan secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di perkotaan dikarenakan nilai probabilitasnya kurang dari  $\alpha$  5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengangguran terbuka di perkotaan dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan dasar di perkotaan.

#### **Pengaruh Tingkat Pendidikan Dasar di Perdesaan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Perdesaan**

Hubungan tingkat pendidikan dasar akan bergerak mengikuti tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan hal tersebut ketika tingkat pendidikan dasar meningkat, maka secara otomatis tingkat pengangguran terbuka juga meningkat. Hal tersebut disebabkan karena lulusan tingkat pendidikan dasar belum mampu memenuhi kebutuhan perusahaan dalam mempekerjakan tenaga kerja. Teori tersebut sesuai dengan hasil uji t pada hubungan tingkat pendidikan dasar di perdesaan yang dapat dijelaskan dengan nilai koefisiensi sebesar 0,247537 sehingga menunjukkan hubungan positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di perdesaan. Berdasarkan Tabel 1. nilai probabilitas sebesar 0,0000 pada tingkat pendidikan dasar di perdesaan, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dasar di perdesaan secara signifikan berpengaruh

terhadap tingkat pengangguran terbuka di perdesaan dikarenakan nilai probabilitasnya kurang dari  $\alpha$  5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di perdesaan dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan dasar di perdesaan.

### **Pengaruh Tingkat Pendidikan Dasar Terhadap Tingkat Kemiskinan**

*Human capital* merupakan investasi jangka panjang yang hasilkan baru akan dinikmati dalam tempo waktu yang cukup lama. Pendidikan merupakan *human capital investment* karena pada dasarnya biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan dapat digolongkan sebagai investasi. Investasi tersebut akan membuahkann *gain* jika seseorang yang telah menamatkan pendidikan dapat menghasilkan pendapatan dari pekerjaan yang digelutinya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerja seseorang. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan akan bergerak berbanding terbalik dengan tingkat pendidikan. Dalam hal ini ketika tingkat pendidikan mengalami kenaikan maka secara otomatis tingkat kemiskinan akan menurun, hal ini sesuai dengan hasil uji t pada hubungan tingkat pendidikan dasar yang dapat dijelaskan dengan nilai koefisiensi sebesar -5,230548 sehingga menunjukkan pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan Tabel 1. nilai probabilitas sebesar 0,0084 pada tingkat pendidikan dasar, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dasar secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dikarenakan nilai probabilitasnya kurang dari  $\alpha$  5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan dasar.

### **Pengaruh Tingkat Pendidikan Dasar di Perkotaan Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Berdasarkan kasus ini, hubungan antara pendidikan dan kemiskinan tidak sela-

lu sesuai dengan asumsi teori ekonomi yang ada, dan memiliki hubungan yang terbalik, hal ini sesuai dengan hasil uji t pada hubungan tingkat pendidikan dasar di perkotaan yang dapat dijelaskan dengan nilai koefisiensi sebesar 2,405204 sehingga menunjukkan hubungan positif terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan Tabel 1. nilai probabilitas sebesar 0,0683 pada tingkat pendidikan dasar di perkotaan, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dasar di perkotaan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dikarenakan nilai probabilitasnya lebih dari  $\alpha$  5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo tidak dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan dasar di perkotaan. Fenomena ini dapat menjelaskan bahwa masyarakat kota memiliki pendidikan minimal SMA sederajat, selain itu jumlah pengangguran juga lebih banyak terdapat di perkotaan, sehingga dengan adanya pendidikan di perkotaan penduduk miskin akan semakin bertambah karena beban yang di tanggung keluarga juga semakin bertambah terutama untuk berinvestasi di bidang pendidikan.

### **Pengaruh Tingkat Pendidikan Dasar di Perdesaan Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Secara teoritis, tingkat kemiskinan akan bergerak berbanding terbalik dengan tingkat pendidikan. Dalam hal ini ketika tingkat pendidikan mengalami kenaikan maka secara otomatis tingkat kemiskinan akan menurun. Tetapi berbeda dalam kasus ini, berdasarkan hasil uji t pada hubungan tingkat pendidikan dasar di perdesaan dengan nilai koefisiensi sebesar 7,635752 sehingga menunjukkan hubungan positif terhadap tingkat kemiskinan.

Fenomena ini dapat menjelaskan bahwa masyarakat desa sebagian besar setelah lulus SMP melanjutkan ke tingkat SMA sederajat, sehingga dengan adanya pendidikan di perdesaan penduduk miskin akan semakin bertambah karena beban yang di tanggung keluarga juga semakin bertambah terutama untuk berinvestasi di bidang pendidikan. Se-

lain melanjutkan di tingkat SMA sederajat, penduduk di perdesaan setelah lulus SMP ada yang langsung bekerja dan ada pula yang menikah, hal tersebut menyebabkan angka nikah dini di Kabupaten Wonosobo menduduki peringkat kedua tertinggi di Jawa Tengah (Wonosobozone, 2017). Pernikahan dini tersebut menyebabkan kemiskinan di perdesaan semakin meningkat karena hasil berinvestasi pada saat menempuh pendidikan tidak membuahkan gain melalui hasil pendapatan dari pekerjaan yang digelutinya tetapi justru menambah beban keluarga karena jumlah keluarga yang ditanggung semakin bertambah. Penduduk yang bekerja karena hanya memiliki ijazah SMP, tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang layak dikarenakan sebagian besar perusahaan menetapkan syarat bagi pelamar pekerjaan minimal lulusan SMA sederajat, karena hal tersebut maka tingkat pendidikan dasar di perdesaan tidak mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

Berdasarkan Tabel 1. nilai probabilitas sebesar 0,0000 pada tingkat pendidikan dasar di perdesaan, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dasar di perdesaan secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dikarenakan nilai probabilitasnya kurang dari  $\alpha$  5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan dasar di perdesaan.

#### **Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Hubungan pengangguran dengan kemiskinan sangat erat karena jika seseorang sudah bekerja maka orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga memiliki kesejahteraan tinggi. Apabila seseorang belum bekerja atau menganggur, maka orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini akan menyebabkan kesejahteraan rendah yang secara otomatis dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Secara teoritis tingkat kemiskinan akan bergerak mengikuti tingkat pengangguran. Dalam hal ini ketika

tingkat pengangguran mengalami kenaikan maka secara otomatis tingkat kemiskinan akan meningkat, hal ini sesuai dengan hasil uji t pada hubungan tingkat pengangguran terbuka yang dapat dijelaskan dengan nilai koefisiensi sebesar 11,95914 yang menunjukkan pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan Tabel 1. nilai probabilitas sebesar 0,0409 pada tingkat pengangguran terbuka, sehingga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dikarenakan nilai probabilitasnya kurang dari  $\alpha$  5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dipengaruhi oleh variabel tingkat pengangguran terbuka. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Rejekiningsih (2013) yang meneliti tentang kemiskinan di Jawa Tengah yang memperoleh kesimpulan bahwa variabel pengangguran menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

#### **Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka di Perkotaan Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Secara teoritis tingkat kemiskinan akan bergerak mengikuti tingkat pengangguran. Dalam hal ini ketika tingkat pengangguran mengalami kenaikan maka secara otomatis tingkat kemiskinan akan meningkat, hal ini sesuai dengan hasil uji t pada hubungan tingkat pengangguran terbuka di perkotaan yang dapat dijelaskan dengan nilai koefisiensi sebesar 4,634052 yang menunjukkan pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan Tabel 1. nilai probabilitas sebesar 0,1777 pada tingkat pengangguran terbuka di perkotaan, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di perkotaan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dikarenakan nilai probabilitasnya lebih besar dari  $\alpha$  5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo tidak dipengaruhi oleh tingkat pengangguran terbuka di perkotaan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Oshima (1990) dalam Yacoub (2012) bahwa

rumah tangga miskin hampir tidak mungkin menjadi penganggur. Pernyataan Oshima tersebut dapat dipahami mengingat di negara berkembang seperti Indonesia tidak terdapat jaminan sosial bagi penganggur, sehingga orang miskin untuk bertahan hidup mau tidak mau harus bekerja meskipun hanya beberapa jam seminggu.

### **Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka di Perdesaan Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Berdasarkan kasus ini, hubungan antara pengangguran dan kemiskinan tidak selalu sesuai dengan asumsi teori ekonomi yang ada, dan memiliki hubungan yang terbalik, hal ini sesuai dengan hasil uji t pada hubungan tingkat pengangguran terbuka di perdesaan yang dapat dijelaskan dengan nilai koefisien sebesar  $-7,325092$  sehingga menunjukkan hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Fenomena ini dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa pengangguran lebih banyak di kota disebabkan karena di kota ketersediaan lapangan pekerjaan sedikit sedangkan lapangan pekerjaan lebih banyak terserap di perdesaan terutama di sektor pertanian dan industri kecil. Pengangguran di perdesaan meningkat justru akan mengurangi tingkat kemiskinan, hal ini disebabkan karena produktivitas meningkat, hasil dan harga panen juga meningkat. Sehingga di perdesaan walaupun jumlah pengangguran meningkat tetapi tingkat kemiskinan akan menurun karena pengangguran bersifat musiman. Ketika menganggur, telah tersedia hasil panen yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Berdasarkan Tabel 1. nilai probabilitas sebesar  $0,1473$  pada tingkat pengangguran terbuka di perdesaan, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di perdesaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dikarenakan nilai probabilitasnya lebih besar dari  $\alpha 5\%$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo tidak dipengaruhi oleh variabel tingkat pengangguran terbuka di perdesaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri

Amalia (2012) yang meneliti tentang kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) pada tahun 2001-2010 yang memperoleh kesimpulan bahwa variabel tingkat pengangguran tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh tingkat pendidikan dasar terhadap tingkat pengangguran terbuka. Terdapat pengaruh tingkat pendidikan dasar di perkotaan terhadap tingkat pengangguran terbuka di perkotaan. Terdapat pengaruh tingkat pendidikan dasar di perdesaan terhadap tingkat pengangguran terbuka di perdesaan. Terdapat pengaruh tingkat pendidikan dasar terhadap tingkat kemiskinan. Tidak ada pengaruh tingkat pendidikan dasar di perkotaan terhadap tingkat kemiskinan. Terdapat pengaruh tingkat pendidikan dasar di perdesaan terhadap tingkat kemiskinan. Terdapat pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan. Tidak ada pengaruh tingkat pengangguran terbuka di perkotaan terhadap tingkat kemiskinan. Tidak ada pengaruh tingkat pengangguran terbuka di perdesaan terhadap tingkat kemiskinan.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulisan manuskrip ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: (1) Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan menuntut ilmu di Universitas Negeri Semarang, (2) Drs. Heri Yanto MBA, PhD. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, (3) Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si. Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan

motivasi dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini, (4) Inaya Sari Melati, S.Pd., M.Pd. Dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh ketelitian dan kesabaran serta memberikan saran dan masukan yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi, (5) Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. Dosen penguji pertama yang telah memberikan kritik dan saran untuk skripsi ini sehingga menjadi lebih baik, (6) Indri Murniawaty, S.Pd., M.Pd. Dosen penguji kedua yang telah memberikan kritik dan saran untuk skripsi ini sehingga menjadi lebih baik, (7) Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang terima kasih atas kebaikan dan ilmu yang telah diberikan selama ini, (8) Bapak, Ibu, Adik, dan Teman tersayang yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan baik secara materiel maupun non materiel sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, (9) Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F. (2012). *Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001-2010*. *Jurnal Ilmiah Econosains*, 10(2), 158-169. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bappenas. (2010). *Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin*. Jakarta.
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo. (2018). *Jumlah Lulusan SD Sederajat dan SMP Sederajat Tahun 2017/2018*. Wonosobo: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo.
- Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo. (2018). *Tingkat Pengangguran Terbuka*. Wonosobo: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo.
- Elfassy, T., Glymour, M. M., Kershaw, K. N., Carnethon, M., Llabre, M. M., Lewis, C. E., ... & Zeki Al Hazzouri, A. (2017). *Association Between Sustained Poverty and Changes in Body Mass Index, 1990–2015: The Coronary Artery Risk Development in Young Adults Study*. *American journal of epidemiology*, 187(6), 1240-1249.
- Gujarati, Damodar N. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irhamni. (2017). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 1986-2015*. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UNY.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan Edisi Keempat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*. Jakarta: Erlangga.
- Mayo, A. (2000). *The role of employee development in the growth of intellectual capital*. *Personnel Review*, 29(4), 521-533.
- Munib, Achmad. (2010). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang: UPT UNNES Press.
- Nagel, K. (2015). *Relationships between unemployment and economic growth—the review (results) of the theoretical and empirical research*. *Journal of Economics & Management*, 20, 64-79.
- Ongkorahardjo, M. D. P. A., Susanto, A., & Rachmawati, D. (2009). *Analisis Pengaruh Human Capital Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Indonesia)*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 11-21.
- Prastyo, A. A., YUSUF, E., & Yusuf, E. (2010). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Puspita, D. W. (2015). *Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah*. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 8(1). Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Rejekiingsih, T. W. (2011). *Identifikasi faktor penyebab kemiskinan di kota Semarang dari dimensi kultural*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1),

- 28-44. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rumahorbo, Restuty Anggereny. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Sari, S.P., Anwar, D. D., & Darussamin, D. D. (2016). *Analisis PDRB, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2013. I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics*, 2 (1), 86-101.
- Statistik, B. P. (2017). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota. *Jakarta: Badan Pusat Statistik Pusat*.
- \_\_\_\_\_. (2018). Kabupaten Wonosobo dalam Angka 2018. *BPS Kabupaten Wonosobo*.
- \_\_\_\_\_. (2018). Jawa Tengah dalam angka. *BPS Provinsi Jawa Tengah*.
- Sudjana, N. Ibrahim. (2014). *Penelitian dan penilaian pendidikan*. Semarang: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2013). *Makro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(03). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Todaro, Michael P dan Stephen C.S. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan*. Jakarta: Diperbanyak oleh PT Armas Duta Jaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pembangunan Nasional*. Jakarta: Diperbanyak oleh PT Armas Duta Jaya.
- Wahyudi, D., & Rejekingsih, T. W. (2013). *Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah*. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(1), 83-97. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Wijayanti, D., & Wahono, H. (2005). *Analisis Konsentrasi Kemiskinan di Indonesia Periode Tahun 1999-2003. Economic Journal of Emerging Markets*, 10(3). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Wonosobozone. (2017). *Angka Nikah Dini Wonosobo Duduki Peringkat Kedua Tertinggi di Jateng*. Diunduh pada 18 Februari 2019. <https://www.wonosobozone.com/angka-nikah-dini-wonosobo-duduki-peringkat-kedua-tertinggi-di-jateng-2/>
- World Bank. 2006. *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Diunduh pada 15 Januari 2019. <http://www.worldbank.org>
- Zulastri, F., Rindayati, W., & Asmara, A. (2013). *Analisis Faktor yang Memengaruhi Aglomerasi Industri Unggulan Daerah dan Hubungannya dengan Daya Saing Industri Daerah*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2). Bogor: Institut Pertanian Bogor.